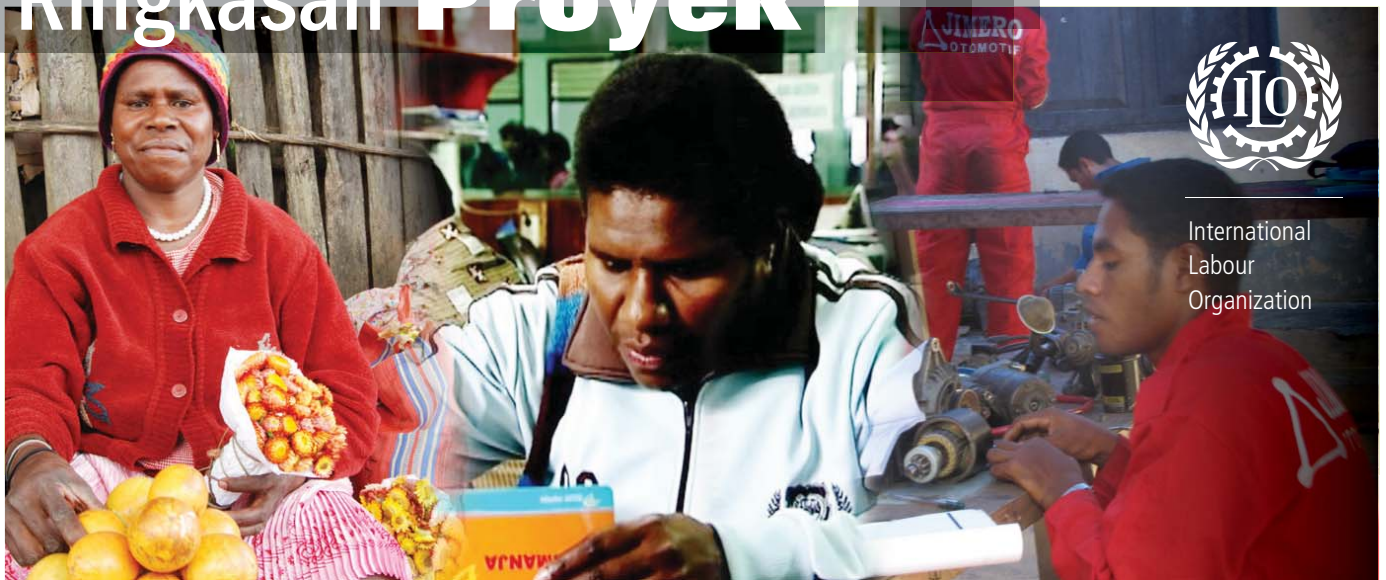


Ringkasan **Proyek**



Program Pembangunan berbasis Masyarakat Tahap II: Pelembagaan Mata Pencaharian yang Berkelanjutan bagi Masyarakat Papua

Tujuan	Untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas, khususnya masyarakat adat Papua melalui pemberdayaan sistem dan proses dasar pemerintah lokal dan masyarakat madani bagi pembangunan mata pencaharian yang berkelanjutan di Papua.
Mitra Utama	■ Gubernur dan Bupati ■ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua dan Papua Barat ■ Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua dan Papua Barat ■ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua dan Papua Barat ■ Universitas Cendrawasih, Universitas Ottow Geisler dan Universitas Negeri Papua Barat (UNIPA) di Provinsi Papua dan Papua Barat ■ Organisasi Komunitas Lokal dan Organisasi Berbasis Komunitas ■ Koperasi Sinar Papua Selatan (Lembaga Keuangan Mikro) ■ Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Pekerja ■ Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi ■ Media Massa Lokal
Jangka Waktu	1,5 tahun (2012-2013)
Cakupan Geografis	Provinsi Papua dan Papua Barat
Referensi Program Nasional	Target Ketenagakerjaan dalam Perencanaan Jangka Menengah diperkuat oleh kebijakan dan program yang menegaskan pertumbuhan ketenagakerjaan dan pengembangan usaha yang berpihak pada kaum miskin.
Donor	 New Zealand's International Aid & Development Agency
Anggaran	USD 685.865
Kontak	Tauvik Muhammad I Staf I tauvik@ilo.org Sinthia Dewi Harkrisnowo I Koordinator Proyek Lokal I sinthia@ilo.org

Latar Belakang Proyek

Tanah Papua yang terbagi atas provinsi Papua dan Papua Barat, merupakan pulau terbesar di Indonesia yang memiliki populasi yang terkecil dengan 3,6 juta penduduk, dengan lebih dari 250 kelompok etnis dan suku bangsa (Sensus BPS 2010) dan sedikitnya 73 persen dari masyarakat adat Papua tinggal di perdesaan.

Meski wilayah Papua dianugrahi kekayaan alam yang besar, akan tetapi tingkat kemiskinannya dua kali lipat tingkat kemiskinan rata-rata nasional dan merupakan yang tertinggi dengan 34,88 persen untuk Provinsi Papua Barat dan 36,80 persen untuk Papua. Provinsi Papua dan Papua Barat juga tertinggal dibandingkan provinsi lainnya untuk indikator Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) non-pendapatan.

Tingkat partisipasi pendidikan dasar sekitar 90 persen untuk Papua Barat dan 76,09 persen untuk Papua (lebih rendah dari tingkat partisipasi nasional yang berkisar 95,23 persen). Ketidaksetaraan gender khususnya dalam komunitas tradisional yang patriarkal adalah sangat kuat, terutama dalam hal (a) akses yang terbatas bagi perempuan atas sumber daya dan pengambilan keputusan, serta (b) pembagian kerja berbasis gender. Situasi ini dimaknai sebagai akses yang terbatas bagi kaum muda dan perempuan masyarakat adat Papua untuk memperoleh mata pencaharian yang layak.

Untuk mempercepat proses pengembangan sumber daya manusia di Papua, Pemerintah Indonesia memberikan status otonomi khusus (Otsus). Namun, penerapan Otsus sepenuhnya masih tertunda akibat rendahnya partisipasi masyarakat madani dan terbatasnya kapasitas dan koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, yang mengakibatkan



ketidaktersediaan kerangka kerja yang inklusif bagi pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan.

Tujuan Proyek

Proyek akan berkontribusi pada Keluaran-3 Proyek Pembangunan berbasis Masyarakat Tahap 2: “Peningkatan kesejahteraan komunitas, khususnya bagi masyarakat adat Papua melalui pemberdayaan proses dan sistem dasar pemerintah lokal dan masyarakat madani demi mengembangkan mata pencaharian yang berkelanjutan di daerah Papua”. Intervensi yang diusulkan akan melengkapi keluaran lain dari proyek PCDP2, yaitu terlaksananya pendekatan partisipatif dalam penyusunan dan perencanaan kebijakan, membaiknya pelaksanaan layanan kesehatan dan pendidikan dan meningkatnya dalam mekanisme koordinasi untuk program pembangunan di daerah Papua.

Proyek akan memfokuskan pada peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan yang ada, termasuk masyarakat adat Papua sebagai penerima manfaat untuk memperoleh akses atas mata pencaharian yang lebih baik melalui tiga komponen kegiatan terkait yang meliputi:

1. Mendukung pengembangan usaha lokal di Papua dan Papua Barat;
2. Memfasilitasi akses terhadap keuangan bagi kelompok usaha mikro yang terpilih; dan
3. Mendirikan pusat pengembangan usaha mikro/ inisiatif inkubasi usaha.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat utama proyek adalah pemangku kepentingan dan komunitas, khususnya masyarakat adat Papua yang berlokasi di delapan kabupaten sasaran: enam kabupaten di Papua (Jayawijaya, Yalukimo, Yappen, Mimika, Boven Digoel dan Sarmi) dan dua kabupaten di Papua Barat (Manokwari dan Fak-fak).

Kegiatan-kegiatan Utama

Berdasarkan pembelajaran dan pengalaman serta jaringan dan kemitraan lokal yang diperoleh dan dikembangkan melalui proyek intervensi ILO sebelumnya dalam menerapkan kegiatan mata pencaharian pada proyek-proyek PIPE (Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua), EAST (Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan) dan ESD (Pengembangan





Pencapaian Terkini

- Kemitraan dengan Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK), dan Dinas Kooperasi tentang inklusi finansial; kegiatan-kegiatan penelitian terkait lembaga keuangan mikro, rantai pasokan pasar dan inkubator bisnis; serta pelatihan tentang pengembangan usaha mikro di Papua dan Papua Barat.

Keterampilan Kewirausahaan) di Papua, kegiatan-kegiatan utama proyek meliputi:

- Memfasilitasi keterkaitan kelompok-kelompok usaha terseleksi dengan lembaga potensial yang dapat memberikan ketrampilan teknis untuk menghasilkan produk-produk bernilai tambah (pemrosesan produksi lanjutan);
- Melakukan pelatihan pengembangan usaha mikro, manajemen keuangan dan pemasaran;
- Memetakan bank-bank publik dan swasta serta lembaga keuangan lainnya untuk memberikan dukungan keuangan mikro;
- Melakukan kajian kelayakan atas akses untuk dukungan keuangan;
- Mengkaji lembaga-lembaga yang ada serta kapasitasnya dalam pengembangan usaha;
- Melakukan studi tentang kebutuhan pengusaha mikro perempuan;
- Menyusun metodologi, program dan kurikulum pelatihan yang jelas untuk mendukung pengembangan usaha;
- Menjalankan analisis pemetaan atas rantai penawaran dan rantai nilai (*value and supply chain*);
- Melakukan survei iklim usaha dan investasi di tingkat provinsi;
- Melakukan diagnostik ketenagakerjaan; dan
- Membentuk pusat pengembangan usaha percontohan di sejumlah kabupaten terpilih.

- Kemitraan dengan Bank Indonesia cabang Papua dan Papua Barat

dalam melaksanakan serangkaian pelatihan percontohan untuk memperkuat lima Pusat Pengembangan Usaha (Layanan Pengembangan Usaha) di lima kabupaten percontohan, menggunakan modul kewirausahaan ILO (GET Ahead dan Pendidikan Keuangan bagi Keluarga). Lima kabupaten percontohan termasuk tiga kabupaten di Papua (Jayawijaya, Boven Digoel dan Sarmi) dan dua kabupaten di Papua Barat (Manokwari dan Fak-fak)

- Sekitar 23 peserta (13 laki-laki dan 10 perempuan) dari tiga universitas lokal (Universitas Cendrawasih dan Universitas Ottow Geissler di Papua dan Universitas Negeri Papua (UNIPA) di Papua Barat) berpartisipasi dalam lokakarya induksi dan berbagi pengetahuan, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas peneliti lokal dalam mengembangkan keuangan mikro dan usaha mikro serta memberdayakan masyarakat.
- Pelaksanaan serangkaian kegiatan pemetaan dan penilaian tentang Akses atas Layanan Keuangan dan Pengembangan Usaha di dua provinsi dan delapan kabupaten. Penelitian dilaksanakan oleh proyek ini bekerja sama dengan Bank Indonesia, UNDP, dan Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat.
- Sekitar 372 orang (230 laki-laki dan 142 perempuan) secara aktif berpartisipasi dalam lokakarya lintas sektor tentang pemetaan lembaga keuangan dan pembangunan usaha di delapan kabupaten sasaran di Papua dan Papua Barat.